

**ARAHAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
MASYARAKAT SUKU BAJO DI WILAYAH PESISIR
KELURAHAN BAJOE, KABUPATEN BONE**

**SKRIPSI
TUGAS AKHIR - 457D5236
PERIODE IV TAHUN 2018/2019**

Sebagai Persyaratan Untuk Ujian Sarjana
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Oleh :
**YOLA AMALIA AYUNINGSIH
D521 15 015**



**DEPARTEMEN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2019



Optimization Software:
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROYEK : TUGAS SARJANA DEPARTEMEN PERENCANAAN
WILAYAH DAN KOTA**

**JUDUL : ARAHAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN MASYARAKAT
SUKU BAJO DI WILAYAH PESISIR KELURAHAN BAJOE,
KABUPATEN BONE**

PENYUSUN : YOLA AMALIA AYUNINGSIH

NO. STB : D521 15 015

PERIODE : IV -TAHUN 2018/2019

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ir. Shirly Wunas, DEA
NIP. 19471215 198103 2 001

Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si
NIP. 19661218 199303 2 001

Mengetahui,
Ketua Departemen
Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik
Universitas Hasanuddin

Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si
NIP. 19661218 199303 2 001



ARAHAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN MASYARAKAT SUKU BAJO DI WILAYAH PESISIR KELURAHAN BAJOE, KABUPATEN BONE

Yola Amalia Ayuningsih¹⁾, Shirly Wunas²⁾, Mimi Arifin²⁾

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Email: yolaamaliaayuningsih10@gmail.com

ABSTRAK

Suku Bajo tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir Kabupaten Bone, membentuk hunian padat, kekerabatan sangat kuat. Permasalahannya, hunian berkembang mengikuti geografis pantai dan penguasaan lahan berbasis kekerabatan, membentuk permukiman padat kumuh serta kualitas lingkungan belum memenuhi standar kesehatan. Pemanfaatan kanal dalam kawasan belum optimal dan kondisi infrastruktur secara menyeluruh belum memadai. Adapun tujuan dari pembahasan ini, 1) Mengidentifikasi kondisi pengembangan permukiman masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe 2) Menjelaskan sarana pelayanan permukiman dan prasarana transportasi masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe 3) Menjabarkan arahan pengembangan permukiman berdasarkan sarana pelayanan permukiman dan prasarana transportasi masyarakat Suku Bajo Kelurahan Bajoe. Data yang digunakan diperoleh melalui survei lapangan (pengamatan langsung, kuesioner, dan wawancara), serta data intansional (Pemerintah) dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan sarana pelayanan dasar dalam permukiman suku bajo sudah memenuhi standar perencanaan perumahan layak huni, namun belum memadai dari sarana penunjang kegiatan kenelayanannya. Prasarana jaringan jalan dalam kawasan permukiman sudah memenuhi indeks aksesibilitas, tetapi belum memadai dari aspek konektifitas terhadap kegiatan bongkar muat dari hasil tangkapan ikan. Arahan pengembangan permukiman berdasarkan sarana pelayanannya dan prasarana transportasi masyarakat Suku Bajo yaitu 1) tambatan perahu diarahkan membangun dermaga konstruksi sederhana atau penataan sistem tambatan perahu sepanjang pesisir dengan membangun undakan tangga setiap 10 m, peningkatan kualitas jaringan jalan pesisir dengan membangun jalur hijau, bangku taman setiap 4 m/ 1 bangku. 2) tempat penjemuran ikan yang terpadu dengan konstruksi kolong rumah panggung, dapat dilengkapi dengan *system solar sell*.

Kata Kunci: *Pesisir, Permukiman, Sarana Prasarana, Suku Bajo*



Disusun oleh: Yola Amalia Ayuningsih, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin
Dibimbing oleh: Shirly Wunas, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

DEVELOPMENT OF BAJO TRIBE SETTLEMENT, IN BAJOE COASTAL VILLAGE, SOUTH SULAWESI

Yola Amalia Ayuningsih¹⁾, Shirly Wunas²⁾, Mimi Arifin³⁾

Hasanuddin University, Indonesia

Email: yolaamaliaayuningsih10@gmail.com

ABSTRACT

The Bajo people grow and develop in the coastal areas of Bone Regency, forming dense dwellings with strong kinship. The problem is that residential development follows coastal geography and kinship-based land tenure, forming dense slum settlements and environmental quality not meeting health standards. The utilization of canals in the area has not been optimal and the overall condition of the infrastructure is inadequate. The objectives of this discussion are: (1) To identify the conditions for the development of Bajo tribe settlements in Bajoe Village (2) Describing the settlement service facilities and transportation infrastructure of the Bajo people in Bajoe Village (3) Describe the direction of settlement development based on settlement service facilities and transportation infrastructure of Bajo people in Bajoe Village. The data used was obtained through field surveys (direct observation, questionnaires, and interviews), as well as institutional (Government) data and literature studies. The results of the study showed that basic service facilities in Bajo tribal settlements had met the standard of decent housing planning, but it was not yet adequate for the facilities to support their tourism activities. The road network infrastructure in the residential area has met the accessibility index, but it is not adequate from the aspect of connectivity to loading and unloading activities from fish catches. Directions for the development of settlements are based on the service facilities and transportation infrastructure of the Bajo people, are 1) boat moorings directed towards building a simple construction dock or structuring a boat mooring system along the coast by constructing stair steps every 10 m, improving the quality of coastal road networks by building green lanes, park bench every 4 m / 1 bench. 2) a fish drying place that is integrated with the construction under the stilt houses, can be equipped with a solar sell system.

Keywords: Coastal, Settlements, Infrastructure, Bajo Tribe

¹⁾ Regional and City Planning Students, Faculties, Hasanuddin University
²⁾ Regional and City Planning Lecturers, Faculty of Engineering, Hasanuddin University
³⁾ Regional and City Planning Lecturers, Faculty of Engineering, Hasanuddin University



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga tugas akhir dengan judul **Arahan Pengembangan Permukiman Masyarakat Suku Bajo di Wilayah Pesisir Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone**” dapat terselesaikan. Tidak lupa pula shalawat dan salam dihanturkan bagi junjungan Nabi Muhammad SAW atas semua bimbingan dan suri tauladan beliau. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Srata Satu.

Dalam proses penyusunan, penulis banyak mengalami kendala namun arahan dan bimbingan yang sangat besar dengan dengan sabar diberikan oleh para pembimbing:

1. **Prof. Dr. Ir. Shirly Wunas, DEA**
2. **Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si**

Serta seluruh pihak yang turut membantu penyelesaian tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung

Penulis menyadari dalam tugas akhir ini, masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan untuk hari yang akan datang. Penulis menghanturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat demi kemandirian ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa, 09 Februari 2019

Yola Amalia Ayuningsih



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yola Amalia Ayuningsih

Nim : D521 15 015

Fakultas/Departemen : Teknik/Perencanaan Wilayah dan Kota

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi **“Arahan Pengembangan Permukiman Masyarakat Suku Bajo di Wilayah Pesisir Kelurahan Bajoe, Kecamatan Bone”** benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 17 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

Yola Amalia Ayuningsih



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan penelitian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan dan petunjuk semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT** dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Teristimewa kepada keluarga besar penulis, Almarhum **Ibu dan Ayah** yang sudah memberikan kasih dan sayang kepada penulis mulai dari kecil sampai sekarang, saudara penulis yaitu kakak **Hendra Junioarto**, adik **Yudha Pramudya** serta paman penulis **Akbar Said, SP, M.Si** yang telah memberikan dukungan, semangat serta perhatian kepada penulis. Tanpa cinta dari keluarga mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan.
3. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin
4. Ibu **Prof. Dr. Ir. Shirly Wunas DEA** selaku PA (Penasihat Akademik) dan Dosen Pembimbing pertama Skripsi yang telah memberikan arahan serta masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada ibu atas waktunya untuk memberikan saran, nasehat dan bimbingan kepada penulis.
5. Ibu **Dr. Ir. Hj. Mimi Arifin, M.Si** selaku Dosen Pembimbing kedua dan Ketua Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota atas arahan dan bimbingannya.
6. Bapak **Prof. Dr. Ir. Slamet Trisutomo, MS** dan Bapak **Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST., M.Si** selaku penguji penulis atas arahan dan motivasinya selama seminar hasil dan seminar tutup penulis.
7. Ibu **Dr-Techn. Yashinta K.D.S., ST., MIP** selaku Kepala Studio Akhir Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, terimakasih untuk arahan dan bimbingannya selama penulis menjalani kegiatan di studio akhir.



8. Seluruh staf kepegawaian Prodi Pengembangan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, **Pak Hairul, Pak Arman, Pak Jhon, dan Pak Sawali** Telah banyak membantu dalam bidang pengurusan kelengkapan administrasi. Bapak Ibu Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota yang tidak sempat disebutkan namanya, terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama penulis menjalani perkuliahan di **Universitas Hasanuddin.**
9. Pemerintah Kabupaten Bone
 - a. Bapak **Dr. H. Andi Fahsar M. Padjalangi, M.Si.** selaku Bupati Kabupaten Bone dan Bapak **Drs. H. Ambo Dalle, M.M** selaku wakil Bupati Kabupaten Bone.
 - b. Kepada Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan, dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone yang telah banyak membantu dan memfasilitasi penulis dalam pengambilan data.
 - c. Kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang telah banyak membantu dan memfasilitasi penulis dalam pengambilan data.
10. Kerabat dan Rekan-rekan Penulis
 - a. Kepada teman-teman seperjuangan sejak semester awal perkuliahan yaitu selalu ada di saat suka dan duka penulis **Desti Rahayu Lataena, Miftahunnisa Rusli, Ratih Puspitasari, Nurfadila, Nurwajehi, Rahmatullah Hasan.** Terima kasih kepada kalian yang selalu sedia mendengarkan curahan hati penulis dan membantu dalam proses penelitian ini
 - b. Teman-teman PWK'15 lainnya (C.ST Aamiin), **Dewa, Aspar, Mursaling, Cica, Maul, Syafi'i, Wahid, Alif, Ulla, Ichsan Caesar Pratama, Fadel, Khoiril, Gusti, Brily, Rodrick, Ramdan Pano Anwar, Iqbal, Fajar** dan semua teman-teman PWK'15 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya .



- c. **Misra, Muh. Firdaus, Tri Ambar wati, Tazkiya Batara Maya, A. Nada Zahira, Muhammad Alif Pratama A, Andi Gusti Bangsawan, Khairullah**, atas kerja sama dan bantuannya selama menjadi penghuni Labo Perumahan dan Permukiman.
- d. Teman-teman seperjuangan sejak SMAN 1 Watampone, **Amel, Iin, Indri, cacha, taqwa, iryani, anti, indah**, dan seluruh teman-teman SMAN 1 yang tidak sempat penulis sebutkan namanya, Terima kasih atas dukungan dan motivasinya .
- e. Teman-Teman KKN Tematik Infrastruktur PUPR Gelombang 99 Kabupaten Wajo, terutama teman-teman posko 6 Kelurahan Tempe, **Ipul** (Teknik Perkapalaan), **Fathir** (MIPA), **Syarif** (Ekonomi), **Nathasya** (Pertanian), **Wahyuni** (FIKP), **Arin** (Hukum), dan **Firma** (FIKP). Terima kasih atas suka duka yang dilalui selama hampir dua bulan serta bantuan, kerja sama dan semangatnya.
- f. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Pengembangan Wilayah dan Kota (**HMPWK FT-UH**) , terima kasih untuk semuanya.
- g. Keluarga Besar Koprasi Mahasiswa Teknik 09 SMFT-UH (**KOMTEK**), terima kasih untuk semuanya.
- h. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penulisan ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas amalan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas ini. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan khususnya pengembangan ilmu perencanaan wilayah dan kota. Mari terus berkarya untuk hari ini, esok dan nanti. Semoga apa yang telah kita kerjakan senantiasa mendapat ridho dari-Nya.

Gowa, 09 Februari 2019

Penulis



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACK	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT BEBAS PLAGIASI.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian.....	3
E. Ruang Lingkup dan Batasan Wilayah	4
F. Sistematika Penulisan.....	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kawasan Pesisir.....	6
B. Pengertian Permukiman	8
C. Teori Tata Ruang.....	11
D. Pemanfaatan Ruang Terbangun di Kawasan Pesisir	16
E. Suku Bajo	19
F. Sarana dan Prasarana Permukiman Nelayan	23
G. Penelitian Terdahulu	27
erangka Konsep Penelitian	28



BAB III METODE PERENCANAAN

A.	Jenis Penelitian.....	30
B.	Lokasi Penelitian.....	30
C.	Populasi dan Sampel.....	32
D.	Teknik Penarikan Sampel.....	33
E.	Teknik Pengumpulan Data	33
F.	Teknik Analisis Data.....	35
G.	Definisi Operasional.....	36
H.	Kebutuhan Data.....	37
I.	Kerangka Penelitian	40

BAB IV GAMBARAN UMUM

A.	Gambaran Umum Kabupaten Bone	41
	1. Kondisi Geografis dan Administratif	41
	2. Kondisi Topografi & Iklim	43
	3. Kondisi Kependudukan	44
B.	Gambaran Umum Lingkungan Bajo Kelurahan Bajoe	44
	1. Kondisi Geografis	44
	2. Kondisi Topografi	46
	3. Karakteristik Fisik Pantai	46
	4. Sejarah Permukiman Suku Bajo	46
	5. Sarana Permukiman.....	49
	a. Kondisi Permukiman	49
	b. Sarana Umum	50
	6. Prasarana Umum.....	51

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A.	Analisis Kondisi Pengembangan Perumukiman Masyarakat Suku Bajo	52
	1. <i>Place</i> (Tempat Tinggal) Permukiman Suku bajo	52
	2. <i>Nature</i> (Alam) Lingkungan Permukiman Suku Bajo	57
	3. <i>Society</i> (Masyarakat)	60



B.	Analisis Sarana Pelayanan Permukiman dan Prasarana Transportasi Masyarakat Suku Bajo	63
1.	Sarana Pelayanan Permukiman.....	63
2.	Prasarana Transportasi.....	69
a.	Transportasi Laut	69
b.	Transportasi Darat	73
C.	Arahan Pengembangan Perumahan berdasarkan Sarana Pelayanan Permukiman dan Prasarana Transportasi Masyarakat Suku Bajo.....	77
BAB VI PENUTUP		
A.	Kesimpulan	82
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		84



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1	Variabel Kebutuhan Data	38
Tabel 4.1	Luas Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2016.....	42
Tabel 4.2	Luas Kelurahan Bajoe tiap Lingkungan Tahun 2017.....	46
Tabel 4.3	Jumlah Sarana Umum Kawasan Suku Bajo Tahun 2018.....	50
Tabel 5.1	Hubungan Kekerabatan Dalam Proses Pembangunan Perumahan Suku Bajo	60
Tabel 5.2	Perkembangan Ruang Permukiman Menurut Doxiadis, 1968.....	61
Tabel 5.3	Jumlah Sarana Pelayanan Suku Bajo	63
Tabel 5.4	Analisis Jenis Sarana di Kawasan Permukiman Suku Bajo	63
Tabel 5.5	Kondisi Jalan pada Lingkungan Suku Bajo	73
Tabel 5.6	Jumlah Transportasi yang digunakan di Lingkungan Bajo	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Batas-batas Fisik Wilayah Pesisir	7
Gambar 2.2	Tipologi Perkembangan Daerah Pantai	18
Gambar 2.3	Pola Perkembangan Daerah Terbangun di Daerah Pantai	19
Gambar 2.4	Permukiman Suku Bajo di Kelurahan Bajoe.....	22
Gambar 2.5	Kerangka Konsep	29
Gambar 3.1	Lokasi Penelitian	31
Gambar 4.1	Lingkungan Bajo, Kelurahan Bajoe	47
Gambar 4.2	Salah Satu Rumah Panggung di Atas Kawasan Genangan Air.	49
Gambar 4.3	Salah Satu Rumah <i>Landed</i> di Daratan.....	49
Gambar 4.4	Sarana Umum Kawasan Permukiman Suku Bajo	51
Gambar 4.5	Prasarana Umum Jaringan Jalan.....	51
Gambar 5.1	Peta Analisis Hunian Yang Langsung Berhadapan Dengan Laut.....	54
Gambar 5.2	Peta Analisis Lokasi Permukiman di atas Genangan Air	55
Gambar 5.3	Peta Analisis Lokasi Permukiman di Daratan	56
Gambar 5.4	Peta Analisis Kualitas Lingkungan pada Daerah Daratan.....	58
Gambar 5.5	Peta Analisis Kualitas Lingkungan Pada Daerah di atas Genangan Air	59
Gambar 5.6	Grafik kekerabatan dalam lokasi hunian	60
Gambar 5.7	Peta Analisis Kekerabatan dalam Lokasi Hunian Suku Bajo	62
Gambar 5.8	Peta Analisis Sarana Pelayanan Suku Bajo	65
Gambar 5.9	Peta Analisis Radius Pelayanan Pendidikan.....	66
Gambar 5.10	Peta Analisis Radius Pelayanan Peribadatan.....	67
Gambar 5.11	Peta Analisis Radius Pelayanan Perdagangan	68
Gambar 5.12	Tambatan Perahu di Pinggir Tanggul	69
Gambar 5.13	Tambatan Perahu melalui Kanal dis Sekitar Hunian.....	70



Gambar 5.14	Peta Analisis Jalan Sirkulasi Perahu.....	71
Gambar 5.15	Peta Analisis Tambatan Perahu	72
Gambar 5.16	Perahu yang ditambatkan di dekat rumah pada segmen Genangan Air.....	75
Gambar 5.17	Perahu yang ditambatkan di tepi tanggul	75
Gambar 5.18	Peta Analisis Kondisi Jalan Pada Lingkungan Bajo.....	76
Gambar 5.20	Ilustrasi/Scenario Tambatan Perahu	77
Gambar 5.21	Ilustrasi/Scenario Potongan Jalan Pesisir pada Jalan Tanggul Kelurahan Bajoe	78
Gambar 5.22	Ilustrasi/Scenario Tempat Pelelangan Ikan	79
Gambar 5.23	Peta Arah Pengembangan Alternatif I	80
Gambar 5.24	Peta Arah Pengembangan Alternatif II.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini Penataan ruang yang belum efektif, tepat dan akurat menjadi isu pokok yang terus dipermasalahkan pada semua daerah, hal ini berkaitan dengan pola pembangunan yang terus mengedepankan prinsip berkelanjutan dan layak huni, mencakup aspek fisik, sosial ekonomi, juga ekologi dan lingkungan.

Kawasan perdesaan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pembentukan kawasan perkotaan, dimana kawasan perdesaan dalam pembentukan kawasan permukimannya masih dipengaruhi oleh adanya faktor tidak berwujud (*intagible*) yang dijalankan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya. Sistem nilai sendiri merupakan lapisan tidak berwujud (*intagible*) dari adat atau tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1992).

Kebudayaan sendiri mempunyai tiga wujud; pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks kelakuan pola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya masyarakat.

Terbentuknya permukiman komunitas Suku Bugis dan Suku Bajo di Bajoe di latarbelakangi oleh sebagian besar masyarakat yang mempunyai sumber mata pencaharian sebagai nelayan. Mereka membentuk permukiman kampung nelayan untuk memudahkan aksesibilitas terhadap kegiatan sehari-hari sebagai nelayan, mulai dari penangkapan ikan ataupun hasil-hasil laut lainnya sampai pada pemasaran, Semuanya dilakukan di kampung.

Menurut kepala Lingkungan Bajo, pada tahun 1960 kondisi permukiman Suku Bajo pada Lingkungan Bajo mirip dengan perkampungan Suku Bajo di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Torosiaja yang di mana permukiman Suku Bajo terletak di pulau kecil yang dikelilingi perairan dan terpisah dengan daratan serta penghubung antar rumah berupa titian kayu. Pada tahun 1970 hingga awal 1980 masyarakat Suku Bajo di



Lingkungan Bajo mulai menimbun rumah mereka dengan bebatuan atau karang agar tiang tancap pada rumah mereka terhindar oleh ombak dari air laut atau lapuk akibat terjangan air laut.

Hingga tahun 1980. Pemerintah sudah membangun jalan pada sekitar permukiman Lingkungan Bajo, hingga tahun 1980 sebagai permukiman pada Lingkungan Bajo sudah tertimbun penuh dan menjadi daratan hingga sekarang.

Hingga tahun 1980-an. Pemerintah sudah membangun jalan pada sekitar permukiman Lingkungan Bajo, hingga tahun 1980-an sebagai permukiman pada Lingkungan Bajo sudah tertimbun cenderung tertimbun, hal ini disebabkan oleh perilaku masyarakat yang mereklamasi lokasi bangunan mereka, lokasi bangunan yang dekat dengan daratan di reklamasi oleh masyarakat pada Lingkungan Bajo melakukan reklamasi dengan menaruh karang di bawah rumah, karang di bawah rumah yang telah memiliki tinggi sama dengan jalan yang awalnya hanya dengan karang kini kembali di lapisi dengan tanah hingga menjadi daratan baru.

Komunitas Suku Bajo tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir Kabupaten Bone. Permasalahan yang timbul adalah hunian berkembang kuat, mengikuti geografis pantai dan penguasaan lahan berbasis kekerabatan, membentuk permukiman padat terkesan kumuh serta kualitas lingkungan yang belum memenuhi standar kesehatan, pemanfaatan kanal dalam kawasan tersebut belum optimal dan kondisi infrastruktur secara menyeluruh belum memadai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menganggap penting untuk memberikan gambaran secara deskriptif mengenai kondisi pengembangan permukiman masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone sebagai salah satu alternatif yang dapat dioptimalkan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah perencanaan permukiman pesisir, guna melestarikan alam dan budaya.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pengembangan permukiman masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone ?



2. Bagaimana sarana pelayanan permukiman dan prasarana transportasi masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe ?
3. Bagaimana arahan pengembangan permukiman berdasarkan sarana pelayanan permukiman dan prasarana transportasi masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini berdasar atas beberapa masalah yang telah dipaparkan di atas adalah:

1. Mengidentifikasi kondisi pengembangan permukiman masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone
2. Menjelaskan sarana pelayanan permukiman dan prasarana transportasi masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe
3. Menjabarkan arahan pengembangan permukiman berdasarkan sarana pelayanan permukiman dan prasarana transportasi masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini mampu menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait sarana pelayanan permukiman dan prasarana transportasi permukiman pesisir Suku Bajo serta Arahan pengembangan kawasan permukiman pesisir di Kelurahan Bajoe.
2. Bagi mahasiswa dan lembaga permukiman, diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan kajian maupun perencanaan lanjutan yang terkait dengan pengembangan kawasan permukiman pesisir.
3. Bagi masyarakat setempat dan lembaga non formal, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menambah wawasan tentang karakteristik permukiman pesisir yang ada di Suku Bajo, Kelurahan Bajoe, Kabupaten Bone.



E. Ruang Lingkup dan Batasan Wilayah

1. Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada kondisi pengembangan permukiman masyarakat Suku Bajo, Lingkungan Bajo Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone.

Selain itu, dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap arahan pengembangan permukiman Suku Bajo berdasarkan sarana pelayanan permukiman dan prasarana transportasi pada wilayah pesisir Kelurahan Bajoe.

2. Wilayah Penelitian

Penelitian dibatasi pada lingkungan permukiman Suku Bajo yang berlokasi pada Lingkungan Bajo, Kelurahan Bajoe, Kabupaten Bone dengan luas wilayah 4.559 km².

F. Sistematika Penulisan

Untuk Sistematika penyusunan laporan penelitian ini, penulis menjelaskan berdasarkan bab-bab, antara lain :

Bagian Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan/ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bagian Kedua, menguraikan kajian teori yang terkait tujuan penelitian, menjelaskan, teori-teori yang berkaitan dengan pola ruang permukiman, peraturan pemerintah, Undang-Undang yang terkait dengan pembangunan perumahan permukiman dan memuat penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini, serta kerangka pikir penelitian.

Bagian Ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pemilihan lokasi penelitian, populasi sampel dan teknik sampling, teknik pengambilan data, teknik analisis data, alat analisis, teknik penyajian data penelitian, kebutuhan data, definisi operasional variabel dan alur pikir penelitian.



Bagian Keempat, menguraikan gambaran umum wilayah yang berisi mengenai gambaran umum Kabupaten Bone, dan gambaran umum lokasi penelitian.

Bagian Kelima, menjelaskan tentang hasil pengolahan data, dan hasil analisis beserta pembahasan yang terkait dari rumusan masalah yang dibuat.

Bagian Keenam, merupakan kesimpulan dan saran yang berisi kesimpulan sebagai hasil dari analisis yang telah dilakukan dan juga saran untuk kajian lanjutan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kawasan Pesisir

Penjelasan umum mengenai kawasan pesisir yang meliputi definisi dan karakteristik wilayah merupakan hal yang sangat penting, hal ini bertujuan agar pemahaman mengenai wilayah pesisir dapat dimengerti dan merupakan awal pemahaman dari studi ini. Pengertian tentang pesisir sampai saat ini masih menjadi suatu pembicaraan, terutama penjelasan tentang ruang lingkup wilayah pesisir yang secara batasan wilayah masih belum jelas. Berikut ini adalah definisi dari beberapa sumber mengenai wilayah pesisir.

Ketchum dalam Kay dan Alder (1999) “ *The band of dry land adjacent ocean space (water dan submerged land) in wich terrestrial processes and land uses directly affect oceanic processes and uses, and vice versa*”. Diartikan bahwa wilayah pesisir adalah wilayah yang merupakan tanda atau batasan wilayah daratan dan wilayah perairan yang mana proses kegiatan atau aktivitas bumi dan penggunaan lahan masih mempengaruhi proses dan fungsi kelautan.

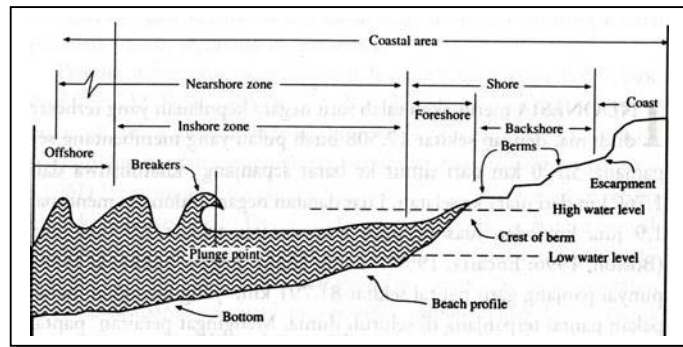
Pengertian wilayah pesisir menurut kesepakatan terakhir internasional adalah merupakan wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*) (Beatley et al, dalam Dahuri, dkk, 2001).

Pengertian wilayah pesisir menurut Soegiarto (Dahuri, dkk, 2001:9) yang juga merupakan pengertian wilayah pesisir yang dianut di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dimana wilayah pesisir ke arah darat meliputi daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses

yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran airtawar, maupun yang an oleh kegiatan manusia di darat seperti pengundulan hutan dan



pencemaran.



Sumber: Brahtz dalam Supriharyono (2002:2)

Gambar 2.1 Batas-batas Fisik Wilayah Pesisir

Dari pengertian-pengertian di atas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah yang unik karena merupakan tempat percampuran antara daratan dan lautan, hal ini berpengaruh terhadap kondisi fisik dimana pada umumnya daerah yang berada di sekitar laut memiliki kontur yang relatif datar. Adanya kondisi seperti ini sangat mendukung bagi wilayah pesisir dijadikan daerah yang potensial dalam pengembangan wilayah keseluruhan. Hal ini menunjukkan garis batas nyata wilayah pesisir tidak ada. Batas wilayah pesisir hanyalah garis khayalan yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di daerah pesisir yang landai dengan sungai besar, garis batas ini dapat berada jauh dari garis pantai. Sebaliknya di tempat yang berpantai curam dan langsung berbatasan dengan laut dalam, wilayah pesisirnya akan sempit.

Menurut UU No. 27 Tahun 2007 Tentang batasan wilayah pesisir, kearah daratan mencakup wilayah administrasi daratan dan kearah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan.

Ekosistem wilayah pesisir dan lautan dipandang dari dimensi ekologis memiliki 4 fungsi/peran pokok bagi kehidupan umat manusia yaitu (1) sebagai penyedia sumberdaya alam sebagaimana dinyatakan diatas, (2) penerima limbah, (3) penyedia jasa – jasa pendukung kehidupan manusia (life support services), (4) penyedia jasa – jasa kenyamanan (*amenety services*) (Bengen 2001).



B. Pengertian Permukiman

Permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (*livible*), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan.

Menurut undang-undang nomir 01 tahun 2011 yang dimaksud dengan perumahan dan permukiman adalah :

1. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, penandaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
2. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
3. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasaranan, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
4. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
5. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
6. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

sarkan definisi perumahan, permukiman serta sarana dan prasarana yang tertentu antara lain :



- a. Berdasarkan Undang-undang no.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
- b. Berdasarkan Pedoamn Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum N0.41/PRT/M/2007 Permukiman adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha.
- c. Menurut Kamus Tata Ruang (1997), Permukiman adalah
 - 1) Kawasan yang didominasi oleh lingkungan huninan dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana prasarana lingkungan serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung peri kehidupan dan penghidupan sehingga permukiman tersebut dapat berdaya gunan dan berhasil guna.
 - 2) Tempat atau daerah untuk bertempat tinggal, tempat untuk menetap.
- d. Menurut Kamus Tata Ruang (1997) Kawasan Permukiman adalah:
 - 1) Sebidang tanah/lahan yang diperuntukkan bagi pengembanagan permukiman,
 - 2) Daerah tertentu yang didominasi lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana prasarana lingkungan serta tempat kerja yang memberi Pelayanan dan Kesempatan kerja guna mendukung peri kehidupan dan penghidupan sehingga fungsi kawasan dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- e. Menurut Kamus Tata Ruang (1997), Perumahan adalah kelompok rumah yang dilengkapi dengan Sarana Prasarana lingkungan.
- f. Menutut Kamus Tata Ruang (1997), Kawasan Perumahan adalah kawasan dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal/hunian yang dilengkapi sarana dan

ana lingkungan.

i Utama Kawasan Permukiman



Dalam modul Terapan Pedoman kriteria Teknis Kawasan Budi daya Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.41/PRT/M/2007, fungsi kawasan peruntukan permukiman anatara lain:

1. Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan masyarakat sekalaigus menciptakan interaksi sosial.
2. Sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

b. Kriteria Umum Kawasan Permukiman

Menurut *Budi Sinulingga* (2005:209) dalam bukunya yang berjudul *Pembangunan Kota, Tinjauan Regional dan Lokal*, Persyaratan dasar permukiman tentang ketentuan yang baik untuk suatau permukiman yaitu harus memenuhi sebagaai berikut:

1. Lokasinya sedemikian rupa sehingga tidak terganggu oleh kegiatan lain seperti pabrik, yang umumnya dapat memberikan dampak pada pencemaran udara atau pencemaran lingkungan lainnya.
2. Mempunyai akses terhadap pusat-pusat pelayanan seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan lain-lain.
3. Mempunyaia fasilitas drainase, yang dapat mengalirkan air hujan dengana cepat dan tidak sampai menimbulkan genangan air walaupun hujan yang lebat sekalipun.
4. Mempunyai fasilitas penyediaan air bersih, berupa jaringan distribusi yang siap untuk disalurkan ke masing-masing rumah.
5. Dilengkapi dengan fasilitas air kotor/tinja yang dapat dibuat dengan sistem invidual yaitu tanki septik dan lapangan rembesan, ataupun tanki septik komunal.
6. Permukiman harus dlayani oleh fasilitas pembungan sampah secara teratur agar lingkungan permukiman tetap nyaman.

ayani oleh sarana dan prasarana lingkungan.



C. Teori Tata Ruang

Berdasarkan dari ketentuan umum, pengetahuan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan

Tata Ruang merupakan suatu artian harfiah dari kata “*Spasial*” yaitu segala sesuatu yang dipertimbangkan berdasarkan keruangan. (Foley, Donald. 1970). Sedangkan Chadwick (1981) mengartikan tata ruang (*spasial arrangement*) sebagai tatanan berbagai unsure kegiatan pada atau di dalam ruang. Mc Loghlin dalam Chadwick (1981) mengemukakan pengertian tat ruang atau *spasial planning* sebagai perwujudan perilaku manusia ke dalam tatanan aktivitas. Dalam hal ini terkandung 2 pengertian yaitu tata ruang sebagai wadah dan komponen-komponen tata ruang (*spasial components*) sebagai pembentuk tatanan ruang. Jadi tata ruang merupakan penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan fisik maupun non-fisik dimana terdapat hubungan *organisatoris* antara berbagai macam obyek dan manusia dalam ruag-ruang tertentu.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

1. Struktur Ruang

Kata kunci di dalam menggambarkan struktur pemanfaatan ruang adalah gambaran mengenai hubungan keterkaitan (*linkages*) antara aspek-aspek aktivitas-aktivitas pemanfaatan ruang. salah satu wujud pendeskripsian wilayah sebagai suatu sistem, adalah aspek struktur hubungan antar komponen-komponen yang ada di dalam wilayah tersebut. Deskripsi interaksi antar wilayah atau pusat-pusat konsentrasi wilayah, yang sering digambarkan dengan aliran arus perjalanan (*trips*) dan migrasi. Aliran jumlah kendaraan baik dalam bentuk tabel maupun peta, merupakan pendekatan yang paling umum. Di dalam pendeskripsian spasial di daratan, secara spasial aspek keterkaitan digambarkan melalui jaringan prasarananya (jaringan jalan raya, jaringan rel kereta api, dan lain-lain) dan moda angkutan (bis, kendaraan roda empat, sepeda motor, dan lain-lain), yang dialirkan (orang/penumpang, barang, jasa, informasi, dan lain-lain),



besaran aliran (jumlah kendaraan, jumlah orang/penumpang, volume barang, nilai barang/jasa yang dialirkan, dan lain-lain), hingga aspek tujuan/maksud dari interaksi yang dituju (tujuan pergi bekerja, distribusi pemasaran output barang/jasa, tujuan-tujuan sosial, bersekolah/pendidikan, dan lain-lain).

Aspek kedua struktur ruang setelah jaringan prasarana adalah aspek struktur pusat-pusat aktivitas permukiman. Pada akhirnya, gambaran mengenai kapasitas atau hierarki pusat-pusat dan *linkage* berimplikasi pada kebutuhan sarana dan prasarana. Adanya mekanisme pasar menyebabkan terpenuhinya sebagian dari sarana yang dibutuhkan. Di daerah-daerah tertentu, terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang tidak terjangkau trayek kendaraan umum, kebutuhan sarana transportasi dipenuhi oleh sektor informal penyedia jasa transportasi seperti objek kendaraan bermotor roda dua. Fenomena ojek di berbagai lokasi nyaris mendekati fenomena mekanisme pasar yang sempurna berskala lokal, jumlah ojek (sisi *supply*) dan penumpang (sisi *demand*) berada di dalam keseimbangan yang dinamis sesuai dengan kompetisi pasar di tingkat lokal, terlihat nyaris tanpa keterlibatan langsung pemerintah. Sarana angkutan umum roda empat umumnya merupakan sektor jasa transportasi yang tergolong sebagai sektor formaal. Pemerintah daerah terlibat langsung di dalam penyediaan sarana angkutan ini melalui mekanisme ijin trayek, kebijakan jalur trayek yang diselenggarakan, dan penetapan tarif angkutan. Sektor swasta yang memiliki ijin trayek menyediakan sarana angkutan roda empatnya. Sektor prasarana transportasi berupa pembangunan jalan raya, jembatan dan terminal umumnya merupakan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah di dalam penyediaannya.

2. Pola Ruang

Sebagai alat pendeskripsian, istilah “pola spasial” (ruang) erat kaitannya dengan istilah-istilah kunci seperti pemusatan, penyebaran, pencampuran dan keterkaitan, serta posisi/lokasi dan lain-lain. Istilah pola pemanfaatan ruang (atau pola ruang) berkaitan dengan aspek-aspek distribusi (sebaran) spasial sumberdaya dan aktivitas pemanfaatannya menurut lokasi, setiap jenis aktivitas menyebar ke lokasi yang berbeda-beda dan tingkat penyebaran yang berbeda-beda pula. Dari pandangan yang lain, sumberdaya dan aktivitas manusia yang



memanfaatkannya pun terkonsentrasi dengan skala yang berbeda-beda. Seperti permukiman penduduk terkonsentrasi dengan skala yang berbeda-beda. Dalam dimensi yang lain, kota sebagai bentuk konsentrasi yang kompleks, memiliki ukuran luasan area, jumlah penduduk, jumlah perputaran beredar, total nilai barang dan jasa (PDRB) juga berbeda-beda. Pola pemanfaatan ruang dicerminkan dengan gambaran pencampuran atau keterkaitan spasial antar sumberdaya dan pemanfaatannya. Pada kawasan pedesaan, dicirikan dengan dominasi *mixture* (pencampuran) antar pola ruang lanskap alamiah (*natural landscape*), aktivitas-aktivitas pertanian, dan pengelolaan sumberdaya alam, penambangan. Sedangkan kawasan perkotaan dicirikan oleh pencampuran yang lebih rumit antara aktivitas jasa komersial dan permukiman. Di sisi lain, kawasan *suburban* dan *urban fringe* di daerah perbatasan perkotaan dan pedesaan dicirikan dengan kompleks pencampuran antara aktivitas permukiman, industri dan pertanian.

Secara formal, ekspresi pola pemanfaatan ruang umumnya digambarkan dalam berbagai bentuk peta. Peta penggunaan lahan (*land use map*) dan peta penutupan lahan (*land cover map*) adalah bentuk deskripsi terbaik di dalam menggambarkan pola pemanfaatan ruang.

Jadi pola ruang yang dimaksud yakni pola pengembangan permukiman yang meliputi pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan.

Penanganan permukiman kumuh perkotaan dilaksanakan melalui fasilitas dan bantuan stimulant dalam bentuk bantuan teknik dan infrastruktur bidang permukiman kepada pemerintah daerah dalam menangani permukiman kumuh di daerahnya. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dilaksanakan dengan pola-pola penanganan berupa: (a) pemugaran, (b) peremajaan; atau (c) permukiman kembali.

pengembangan kawasan permukiman pedesaan dilakukan melalui pengembangan prasarana pedesaan potensial dan kawasan agropolitan/minapolitan.



3. Sifat Penataan Ruang Kelautan dan Pesisir

Penataan Ruang menegaskan bahwa penataan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ketentuan ini sejalan dengan konsep Wawasan Nusantara yang melihat darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan wilayah. Dimana laut bukanlah faktor pemisah, melainkan penghubung antara satu dan lain daerah, tetapi karena pada kenyataannya ruang lautan memiliki sifat khusus baik secara teknis maupun yuridis maka diperlukan penanganan yang spesifik. Dengan kata lain subjek hukum yang berkaitan dengan ruang lautan nasional meliputi pula subjek hukum yang diakui menurut hukum internasional. (Suryanto, Agung. 2001)

Jika di ruang daratan status hukum merupakan salah satu faktor yang di perhitungkan dalam menetapkan peruntukan dan penggunaan tanah, maka status hukum yang berbeda antara perairan pendalaman, perairan nusantara, merupakan faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam penataan lautan.

4. Kegunaan

Pengembangan dan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir adalah rumit, mengingat (1) keunikan potensi sumberdaya alam, (2) batas-batas dan pengelolaan administrasi dan yuridisnya, serta (3) kawasan pesisir sebagai tempat bertemunya ruang daratan dan ruang lautan. Selain itu, tekanan kawasan pesisir datang dari dua arah, yaitu dari aktivitas di kawasan perairan sempadan lokasi tersebut serta aktivitas di daratan. Oleh karena itu mengingat sifat pemanfaatannya yang **multi-use**, maka penataan ruang dan pendekatan teknik pengembangan kawasan pesisir bersifat **multi-disipliner, cross-sectoral** dan terpadu. Dengan demikian, diperlukan pertimbangan yang hati-hati dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pengembangan kawasan pantai, karena keunikan masalah yang mencakup dua ekosistem yang berbeda. (Salim, E. dan Jhon, A.L. dalam Irianto, H. 2001).

Meskipun ruang tersebut tidak layak dihuni manusia, seperti ruang hampa pisan di bawah kerak bumi, kawah gunung berapi, tetapi memiliki pengaruh dan pengaruh bagi kehidupan dan kelangsungan hidup. Dengan ketersediaan ruang itu tersendiri tidak terbatas.



5. Hubungan Komponen Tata Ruang Dengan Permukiman Sebagai Lingkungan Binaan

Struktur Tata Ruang pada hakikatnya merupakan hasil dari suatu proses yang mengagihkan obyek-obyek fisik dan aktivitas ke suatu kawasan di suatu wilayah (*Enchenique, Marcial. 1965*).

Pertama, penataan ruang (*spasial planning*) merupakan proses pengagihan aktivitas pada suatu kawasan sesuai dengan fungsional tertentu. *Kedua*, penataan ruang bagi aktivitas seperti untuk tempat bekerja, tempat tinggal, transportasi dan komunikasi. Proses ini, seperti pengadaan bangunan jalan, utilitas umum dan lain-lain akan merupakan kendala bagi proses pengagihan aktivitas tersebut. Berfungsinya unsur tata ruang permukiman kota umumnya dan kota baru khususnya ditentukan oleh komponen-komponen pembentukannya. Permukiman kota akan mencerminkan pola tata ruang sebagai wadah dan komponen-komponen aktivitasnya sebagai wujud fisik. Tatanan aktivitas kota sebagai komponen tata ruang permukiman kota umumnya sudah disadari pentingnya sejak dikembangkan pola pemikiran perencanaan modern (*modern planning*). (*Wills, Margaret. 1978*).

Bertolak dari kebutuhan kehidupan yang harus dibentuk didalam permukiman khususnya permukiman nelayan sebagai suatu wadah spasial, maka berbagai pakar telah mengemukakan konsepsinya tentang komponen tata ruang ini. Permukiman sebagai produk tata ruang mengandung arti tidak sekedar fisik saja tetapi juga menyangkut hal-hal kehidupan non fisik. Jadi, suatu permukiman pada dasarnya merupakan suatu bagian wilayah tempat dimana penduduk (pemukim) tinggal, berkiprah dalam kegiatan kerja dan kegiatan usaha, berhubungan dengan sesama pemukim sebagai suatu masyarakat serta memenuhi berbagai kegiatan kehidupannya (*Porteous, J. Douglas. 1981*).

Di dalam pemikiran klasik, *Patrick Geddes* memberikan karakteristik tentang permukiman sebagai suatu kawasan yang memiliki 3 komponen pokok *place* – tempat tinggal ; *Doxiadis*, mengemukakan bahwa permukiman (*human settlement*) merupakan suatu totalitas lingkungan yang terbentuk dari unsur-unsur yang terdiri dari ‘*Nature*’ (alami), yaitu bahwa permukiman akan



sangat ditentukan oleh adanya alam baik sebagai lingkungan hidup maupun sebagai sumberdaya seperti unsur fisik dasar (iklim, topografi, hidrologi, vegetasi dan fauna); ‘*Anthropos*’ (individu manusia), yaitu permukiman akan sangat dipengaruhi dan mempengaruhi dinamika serta perkembangan kinerja manusia sebagai individu; ‘*society*’ (masyarakat) bahwa permukiman pada hakikatnya dibentuk karena adanya manusia sebagai kelompok masyarakat; ‘*Shells*’ (ruang kehidupan), yaitu suatu ruang kehidupan yang selengkapnyanya yang menyangkut berbagai unsur di mana manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok melaksanakan kiprah kehidupannya; dan ‘*Network*’ (jaringan), yaitu unsur permukiman yang dapat menunjang saling tindak antar berbagai fungsi kegiatan masyarakat, sehingga akan terjadi suatu komunikasi serta jaringan yang berfungsi sebagai penunjang kebutuhan kehidupan lainnya seperti jaringan air bersih, pembuangan, telekomunikasi, listrik. *Ekistics* sendiri mengandung arti sebagai pembentukan suatu rumah, tempat tinggal, suatu kota atau suatu koloni. (*Doxidias, Constatino A. 1968*)

Dari uraian tentang hubungan komponen tata ruang dengan lingkungan binaan di atas dapat dilihat bahwa suatu permukiman umumnya adalah merupakan suatu sistem kawasan fungsional yang mengandung berbagai sub sistem yaitu berbagai aktivitas dan unsur-unsur wadah fisik serta berbagai unsur penunjang lainnya, dimana kesemuanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Dimana hubungan tersebut dapat terlihat dari penjelasan dibawah mengenai perubahan bentuk dan pola tata ruang pada lingkungan binaan pada permukiman khususnya nelayan.

D. Pemanfaatan Ruang Terbangun di Kawasan Pesisir

1. Perkembangan Kota Pesisir

Perkembangan kota-kota di daerah pesisir dilandasi oleh tiga alasan mendasar (*Mulyadi, 2005: 98*), yaitu :

- a. Dapat memberikan fungsi yang efektif sebagai suatu pemusatan masyarakat dengan berbagai tingkat kebudayaan;
- b. Dapat memberikan fungsi kepada kota tersebut sebagai pusat pemerintahan dan kekuasaan di mana penguasaan, pengendalian serta pengawasan



terhadap suatu wilayah dapat dilakukan secara efektif;

- c. Dapat memberikan peranan dan fungsi terhadap kota tersebut sebagai suatu pusat pertukaran barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan peranan perekonomian ke dalam maupun keluar.

Dengan demikian, faktor-faktor perkembangan dan pertumbuhan yang diharapkan dari potensi fisiografis adalah :

1. Keadaan fisik yang dapat memenuhi kebutuhan proses penempatan berbagai kegiatan serta perkembangannya;
2. Ketersediaan potensi fisik yang dapat membantu kelancaran dan aktivitas pergerakan;
3. Dapat menguasai potensi-potensi fisik yang adapat memenuhi kebutuhan starategi keamanan dan pertahanan.

Perkembangan dan pertumbuhan daerah-daerah pantai yang dilandasi oleh berbagai macam bentuk perkembangan dan pertumbuhan kegiatan sosial budaya, ekonomi dan politik jelas akan termanifesrsikan pada perkembangan fisiknya.

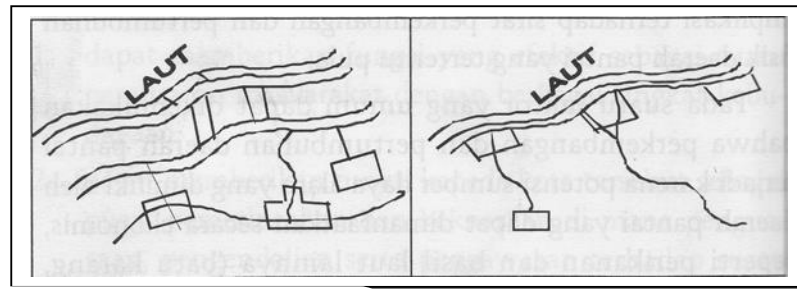
2. Tipologi Perkembangan Kawasan Pesisir

Perkembangan kawasan pesisir (*Sujarto dalam Mulyadi, 2005: 99*) ada dua macam. *Pertama*, perkembangan kawasan pesisir yang intensif maupun ekstensif secara terus-menerus di sepanjang kawasan pesisir. Perkembangan tersebut terjadi karena telah berkembangnya jaringan sarana perhubungan darat yang menghubungkan daerah-daerah sepanjang pesisir.

Kedua, perkembangan intensif yang terjadi karena terpancar di lokasi-lokasi tertentu karena adanya potensi perkembangan tertentu yang secara historis mempunyai potensi perekonomian. Dalam pola yang kedua ini perkembangan dan pertumbuhan hanya terjadi secara intensif pada lokasi-lokasi tertentu saja dengan orientasi kepedalaman.

Dari segi fungsinya, daerah pantai dapat berkembang sebagai suatu kota, a, suatu pusat kegiatan rekreasi dan sebagai suatu kegiatan fungsional seperti industri, stasiun angkutan laut, pusat pengolahan atau kegiatan lainnya.





- (1) Perkembangan pantai yang intensif dan kontinu karena telah majunya sarana perhubungan sepanjang pantai.
- (2) Perkembangan pantai yang intensif tetapi tersebar karena beberapa sarana perhubungan yang belum maju

Sumber : Sujarto dalam Mulyadi (2005:100)

Gambar 2.2 Tipologi Perkembangan Daerah Pantai

3. Pola Perkembangan Daerah Terbangun di Kawasan Pesisir

Menurut Stuart Chapin dan Yunus (2001: 173) unsur-unsur utama perilaku manusia serta dinamika perilaku manusia dalam proses imbal dayanya telah mengakibatkan terciptanya pola-pola keruangan tertentu dalam suatu wilayah/kota. Ada empat pola perkembangan daerah terbangun (*built up areas*) di daerah pantai (Sujarto dalam Mulyadi, 2005: 101), yaitu sebagai berikut :

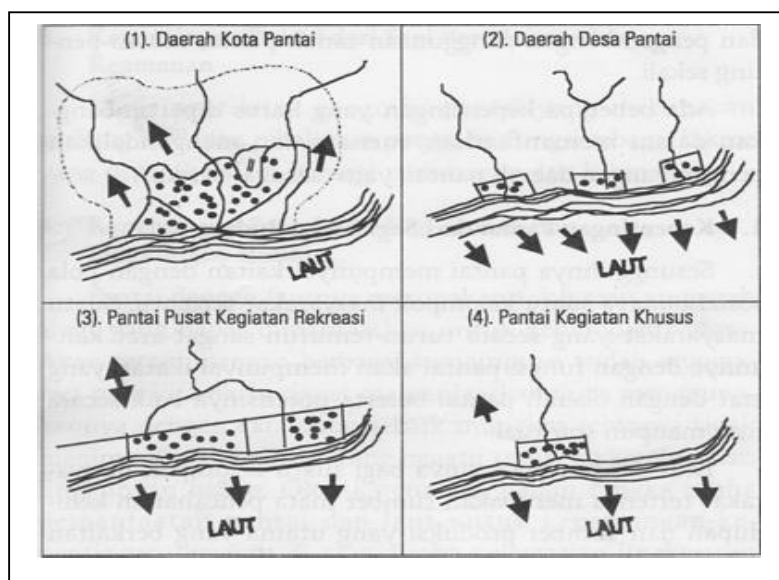
1. *Daerah Kota Pantai*, kota pantai umumnya berkembang karena adanya potensi ekonomi, strategi pertahanan dan sebagai pusat pemerintahan. Daerah terbangun berkembang secara intensif sepanjang pantai. Penggunaan lahan daerah pantai lebih berorientasi ekonomis seperti untuk pelabuhan, pergudangan, dan industri. Adakalanya juga untuk kegiatan rekreasi yang produktif. Daerah pesisir umumnya merupakan “gerbang” kegiatan sosial ekonomi, politik dan budaya bagi daerah belakangnya (hinterland).
2. *Daerah Desa Pantai*, perkembangan dan pertumbuhan dimulai oleh terbentuknya kelompok masyarakat yang mata pencahariannya nelayan. Permukiman umumnya berorientasi ke arah laut karena usaha utama dari hasil laut. Biasanya daerah terbangun terpencar-pencar di tepi pantai sesuai dengan

hasil kebutuhan masyarakat. Jadi, sifat perkembangan fisik adalah ekstensif. *Pusat Kegiatan Rekreasi*, yaitu kawasan rekreasi yang memanfaatkan potensi alam kawasan pesisir. Orientasi kegiatannya adalah ke arah pantai dan



sepanjang pantai serta memberikan pelayanan bagi kebutuhan rekreasi regional di pedalaman. Dalam hubungan ini, peranan jaringan perhubungan darat dengan dan kota-kota lainnya di pedalaman merupakan faktor yang sangat penting.

4. *Pantai untuk Kegiatan Khusus*, yaitu suatu penggunaan fungsi daerah pantai untuk kepentingan kegiatan-kegiatan khusus bagi yang berorientasi kepada ekonomi dan ataupun pemerintah.



Sumber : Sujarto dalam Mulyadi (2005: 103)

Gambar 2.3 Pola Perkembangan Daerah Terbangun di Daerah Pantai

E. Suku Bajo

1. Definisi Suku Bajo

Sebutan “Bajo”, “Suku Bajo”, atau “Orang Bajo”, umumnya digunakan oleh penduduk di wilayah Indonesia Timur untuk menyebut suku pengembara laut ini, yang tersebar di berbagai wilayah (Anwar, 2006).

Suku Bajo merupakan suku yang melakukan segala aktifitasnya di laut. Masyarakat Bajo pada awalnya tinggal di atas perahu yang disebut bido’, hidup

dan pindah bergerak secara berkelompok menuju tempat yang berbeda pilihan lokasi penangkapan ikan. Di atas perahu masyarakat Bajo



menjalani hidupnya sejak lahir, berkeluarga hingga akhir hayatnya. Oleh sebab itu masyarakat Bajo disebut dengan manusia perahu (*Rahman, 2015*).

Suku Bajo dikenal sebagai pelaut ulung yang hidup matinya berada diatas lautan. Bahkan perkampungan mereka pun dibangun jauh menjorok kearah lautan bebas, tempat mereka mencari penghidupan. Laut bagi mereka adalah satu-satunya tempat yang dapat diandalkan. Orang Bajo ini pun menyebar ke segala penjuru wilayah nusantara semenjak abad ke-16 hingga sekitar 40- 50 tahun silam (perpindahan terakhir terjadi di berbagai wilayah di NTT). Di berbagai tempat, orang Bajo banyak yang akhirnya menetap, baik dengan inisiatif sendiri ataupun dipaksa pemerintah. Namun tempat tinggalnya pun tidak pernah jauh dari laut. Mereka membangun pemukiman- pemukiman baru di berbagai penjuru Indonesia. Di Sulawesi Selatan sendiri, Suku Bajo terpusat di Kelurahan Bajoe, Kabupaten Bone. Orang Bajo banyak tinggal di kawasan sepanjang pesisir teluk Bone sejak ratusan tahun silam. Selain itu orang Bajo juga banyak bermukim di pulau-pulau sekitar Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua. Orang Bajo terutama di Sulawesi Selatan banyak mengadaptasi adat istiadat orang Bugis atau Makassar. Atau juga adat istiadat Buton di Sulawesi Tenggara. Sedangkan orang Bajo di Sumbawa cenderung mengambil adat Bugis, bahkan seringkali mengidentifikasi dirinya sebagai orang Bugis/Buton di beberapa daerah. Meskipun telah ratusan tahun tinggal bersama penduduk lokal yang beragama Katolik atau Kristen di NTT, orang Bajo tetap sampai sekarang taat menganut agama Islam, dan bagi mereka Islam adalah satu-satunya agama yang menjadi ciri khas suku ini. Menjaga kekayaan laut adalah salah satu sifat yang diemban oleh Suku Bajo. Dengan kearifannya mereka mampu menyesuaikan diri dengan ganasnya lautan (*Pokja Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 2014*)

Masyarakat Suku Bajo dikenal sebagai masyarakat yang hidup (bermukim) di atas perairan. Adanya interaksi yang intensif antara masyarakat Suku Bajo dengan masyarakat yang hidup di darat menyebabkan terjadinya adopsi pola oleh masyarakat Suku Bajo, termasuk pola permukiman menetap di pinggir sungai hingga bermukim di muara sungai. Tempat tinggal atau rumah Suku Bajo di tepi laut, dan ada beberapa yang berada di atas permukaan air laut. Hal



ini tidak lepas dari tradisi Suku Bajo yang identik dengan kehidupan laut dan mempunyai mata pencaharian utama sebagai nelayan (*Ridwan dan Giyarsih, 2012*).

Suku Bajo adalah sub etnis suku bugis yang berasal dari pesisir pantai, Sebagaimana suku bugis lainnya, warga Bajo mayoritas sebagai nelayan dan sangat ulung mengarungi lautan. *Hag (2004: 52)*, mengatakan bahwa pola hidup masyarakat Suku Bajo cenderung memisahkan diri dari kehidupan kelompok masyarakat yang tinggal di darat. Oleh karena itu, sangatlah beralasan jika muncul persepsi di luar masyarakat Suku Bajo adalah masyarakat terasing, terbelakang dan tertutup (*Ahimsa, 2001*).

Satu hal lain yang sangat penting bagi orang Bajo tentu saja adalah laut. Orang Bajo dan lautan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Salah satu bentuk kedekatan orang Bajo dengan laut adalah dengan cara membuang ari-ari bayi yang baru lahir ke laut. Dibuangnya ari-ari ke laut menunjukkan bahwa semangat hidup (*sumanga*) Suku Bajo yang berasal dari ari-ari berasal dari laut dan tidak dapat lepas dari laut. Kuatnya hubungan orang Bajo dengan laut membuat mereka lebih memilih untuk tinggal dan hidup di laut dari pada menetap di daratan.

2. Permukiman Suku Bajo di Bajoe

Menurut *Nuragifah (2016)*, Permukiman Masyarakat Suku Bajo di Kelurahan Bajoe saat ini cenderung menyatu dengan daratan tapi masih ada yang bermukim di atas air dan sudah ada yang memiliki sertifikat hak milik, tetapi permukiman Masyarakat Bajo ini merupakan kawasan konservasi hutan Mangrove.

Tata lingkungan permukiman Suku Bajo yang ada di kelurahan Bajoe tidak terlepas dari sejarah perjuangan melawan penjajah bersama Kerajaan Bone, dalam mempertahankan diri dari serbuan musuh. Letak permukiman Bajo, berada di sisi kanan tanggul dermaga Pelabuhan Bajoe. Tapak rumah di permukiman Bajo saat ini dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu di darat, di peralihan darat dan laut, dan di laut (*Syahrana, 2004*).

Berdasarkan uraian sejarah proses bermukimnya Suku bajo di Bajoe, dari darat mengalami perkembangan melalui beberapa perubahan bentuk, mulai



membuat bidok, ke babaroh/papondok lalu menjadi rumah yang ada pada saat ini (Mirawati, 2014).

Bila kini orang Bajo asli ada yang tinggal di daratan, penyebabnya adalah kebijakan pemerintah daerah setempat yang merelokasi mereka, tetapi ada pula sebagian dari mereka yang tinggal menetap atas kemauan sendiri. Mereka yang menetap di darat atas kemauan sendiri adalah yang semula melabuhkan perahunya untuk sementara waktu dengan tujuan berlindung dari angin topan dan gelombang laut yang besar. Karena merasa cocok dengan daerah tersebut, maka mereka tinggal dalam waktu lebih lama dan akhirnya menetap di daerah itu. Ada juga yang karena di antara mereka telah menjalin hubungan persaudaraan, yaitu melalui perkawinan dengan orang-orang penduduk asli daerah tempat tinggal mereka sementara. Mereka yang tinggal menetap biasanya mendirikan rumah permanen di pinggir pantai (Indrawasih dan Antariksa, 2003).

Hidup di darat tak berarti tradisi selama hidup di lepas pantai, hilang. Mereka tetap menjalani kehidupan di rumah panggung yang dihuni secara bersama dan terdiri dari beberapa keluarga. Namun, sebagaimana kehidupan nelayan pada umumnya, kehidupan sehari-hari warga Suku Bajo pun tak pernah terbebas dari kemiskinan.



Gambar 2.4 Permukiman Suku Bajo di Kelurahan Bajoe

F. Sarana dan Prasarana Permukiman Nelayan

1. Sarana Permukiman Nelayaan

Sarana permukiman nelayan dikutip dari Patandianan dan Toban meliputi:

a) Sarana Kesehatan

Lingkungan permukiman yang mempunyai penduduk 6.000 jiwa, perlu disediakan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, posyandu, postu, fasilitas diletakkan pada lokasi yang mudah terjangkau. (luas lahan puskesmas pembantu 0,12 Ha/unit dan luas lahan posyandu 0,05 Ha/unit).

b) Sarana Pendidikan

- Taman kanak-kanak diperuntukkan bagi anak-anak usia 5-6 tahun minimal penduduk pendukungnya 1.000 jiwa. Lokasi sebaiknya berada ditengah - tengah kelompok masyarakat / keluarga dan digabung dengan tempat/taman bermain di RW atau RT. Radius pencapaian tidakah lebih dari 500 meter (luas lahan 0,12 Ha/unit)
- Sekolah Dasar untuk anak usia 6-12 tahun min. penduduknya 1.600 jiwa. Lokasi sebaiknya tidak menyeberang jalan lingkungan dan masih di tengah kelompok keluarga, radius pencapaian maksimum 1.500 m. (luas lahan 0,27 Ha/unit).
- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah untuk melayani anak-anak lulusan SD, dimana 3 unit sekolah dasar dilayani oleh 1 unit SLTP yang dapat dipakai pagi/sore minimum penduduk pendukungnya 4.500 jiwa, lokasinya dapat digabung dengan lapangan olahraga atau sarana pendidikan yang lain (luas lahan 0,27 Ha/unit)
- Sekolah Lanjutan Tingkat Atas adalah lanjutan dari SLTP, dimana 1 unit SLTP, dilayani oleh 1 unit SLTA. Minimum penduduk pendukungnya adalah 4.800 unit (luas lahan 0,27 Ha/unit)

c) Sarana Perdagangan

Toko/warung untuk lingkungan permukiman yang mempunyai penduduk 250 jiwa perlu disesuaikan fasilitas perbelanjaan terkecil. Selain sarana perdagangan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dibutuhkan sarana perdagangan berupa toko yang berhubungan dengan kegiatan melaut.



d) Sarana Sosial

- Tempat peribadatan, yaitu tempat penganut suatu agama melaksanakan aktivitas ritual beragamanya sehari-hari. Untuk >15-40 jiwa diperlukan sebuah fasilitas peribadatan berupa mesjid, gereja dan sebagainya sedangkan untuk <15 orang cukup dilakukan di rumah.
- Balai karya/Balai Desa, yaitu tempat yang disediakan untuk menampung berbagai kegiatan seperti rapat, pertemuan, pelayanan kesehatan masyarakat, dan PKK.
- Pos jaga adalah tempat yang disediakan untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan desa.

e) Tempat bermain/olahraga

f) Untuk penduduk sebanyak 250 jiwa (setingkat RT) diperlukan ruang terbuka untuk bermain/taman. Sedangkan untuk penduduk sebanyak 2.500 jiwa (setingkat RW) diperlukan lapangan olah raga seperti lapangan sepak bola yang lokasinya disatukan dengan fasilitas lingkungan lainnya.

g) Tempat penjemuran ikan, untuk mengeringkan ikan dan proses pengawetan ikan

h) Tempat pembuatan jaring.

i) Tempat pelelangan ikan, merupakan tempat jual beli ikan dengan sistem lelang. Kegiatan yang terjadi di tempat ini berupa menimbang ikan, menempatkan ikan pada keranjang-keranjang sesuai dengan jenis-jenisnya atau digelar di lantai siap untuk dilelang, pelelangan, lalu pengepakan dengan es untuk keranjang/peti ikan yang sudah laku.

Sarana Permukiman Nelayan dikutip dari Syahriarto 2013, yaitu:

a) Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tempat pelelangan ikan (TPI) adalah tempat jual beli ikan dengan sistem lelang dimana terdapat kegiatan menimbang, menempatkan pada keranjang-keranjang dengan jenis-jenisnya atau digelar di lantai siap untuk dilelang, kemudian pelelangan lalu pengepakan es untuk keranjang/peti ikan yang sudah laku. Lokasi TPI sebaiknya dekat dengan dermaga sehingga memudahkan pengangkutannya dari kapal-kapal. Kegiatan ini banyak menggunakan air, oleh



karena itu sebaiknya dekat dengan air bersih kondisi saluran drainase di lokasi TPI harus baik agar air tidak tergenang sehingga tidak menimbulkan bau yang menyengat.

b) Tambatan perahu

Tempat penambatan perahu adalah tempat perahu-perahu bersandar/ parkir sesudah dan sebelum bongkar muat ikan. Biasanya berdekatan dengan TPI. Fungsi tambatan perahu sebagai untuk mengikat perahu saat bertabuh dan tempat penghubung antara dua tempat yang dipisahkan oleh laut, sungai maupun danau. terdapat dua tipe tambatan perahu terdiri dari:

- Tambatan tepi, dipergunakan apabila dasar tepi sungai atau pantai cukup dalam, dibangun searah tepi sungai atau pantai.
- Tambatan dermaga, digunakan apabila dasar sungai atau pantai cukup landai, dibangun menjalar ketengah.

c) Tempat penjemuran ikan

Tempat penjemuran ikan berfungsi untuk mengeringkan ikan sebagai proses pengawetan. Adapun syarat-syarat tempat penjemuran ikan sebagai berikut:

- Tempat penjemuran ikan sebaiknya berupa lapangan terbuka atau terkena sinar matahari.
- Wadah penjemuran ikan sebaiknya berlubang agar air dapat turun supaya cepat kering dan tidak berkarat
- Tempat penjemuran ikan diusahakan bersih dengan membuat saluran pembuangan.
- Sebaiknya ada jaringan drainase supaya tidak ada air yang tergenang sehingga tidak menimbulkan bau.
- Lokasi penjemuran ikan sebaiknya mudah diawasi.

2. Prasarana Permukiman Nelayan

Prasarana dikutip dari Patandianan dan Toban, meliputi:

→ Dermaga

Di dalam lingkup kegiatan perikanan tingkat desa, dermaga merupakan tempat berlabuh perahu saat istirahat dan tempat para nelayan mendaratkan ikan



hasil tangkapannya untuk dijual atau dilelang. Prasarana ini biasanya dibuat dari konstruksi beton atau kayu.

b) Tambatan perahu

Adalah tempat perahu-perahu nelayan bersandar/parkir sebelum dan sesudah bongkat muat ikan.

c) Tanggul dan pemecah gelombang

d) Jaringan listrik harus dapat menjangkau seluruh areal permukiman

e) Jaringan jalan

- Jalan lingkungan, yaitu jalan yang menghubungkan suatu kelompok rumah ke kelompok rumah yang lain, atau dari kelompok rumah ke fasilitas lingkungan atau menuju tempat sarana bekerja.
- Jalan setapak, yaitu jalan yang menghubungkan antar rumah didalam kelompok perumahan nelayan secara konstruktif. Jalan ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan beroda empat, hanya dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dan becak. Ukuran jalan setapak 1,2 – 1,5 m jika mungkin ditambah jalur kerikil 0,5 m

f) Jaringan air bersih

Bila memanfaatkan sumber air baku yang tersedia baik air tanah atau air permukaan melalui pembuatan sumur gali, sumur pompa tangan (SPT), saringan pipa resapan (SPR), penampungan air hujan (PAH), saringan pasir lambat (SPL), instalasi pengolahan air (IPA), hidran umum (HU), terminal air (TA) dan sistem perpipaan/jaringan.

g) Darainase

Berfungsi menyalurkan air hujan dari setiap rumah yang berupa air limbah agar lingkungan perumahan bebas dari genangan air. Ukuran saluran drainase ditentukan berdasarkan kapasitas volume air yang akan ditampung dan frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan serta daya resap tanah. Saluran drainase di bangun pada kiri kanan jaringan jalan, namun kadang-kadang untuk

hemat biaya kadang-kadang saluran terdapat hanya di satu sisi.



h) Persampahan

Bak sampah harus dapat menampung jumlah sampah yang dihasilkan. Bak sampah dibuat dari bahan yang menjamin kebersihannya dan mempunyai penutup, sampah basah terpisah dengan sampah kering, pengangkutan dan pemusnahan sampah harus lancar dan tidak tinggal membusuk. Tempat pembuangan akhir dari sampah tersebut harus jauh dari lingkungan perumahan.

G. Penelitian Terdahulu

Secara umum penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun penelitian-penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Peneliti	Tujuan	Analisis	Hasil
Nama Peneliti: Vera Vebriani Judul Skripsi: Arahan Penataan Permukiman Suku Bajo dengan Kegiatan Usaha Berbasis Rumah Tangga di Kelurahan Bajoe	Memberikan arahan penataan permukiman suku Bajo dengan kegiatan usaha berbasis rumah tangga (UBR)	Analisis Deskriptif, Kualitatif, Analisis Komparatif, Analisis Spasial	Berupa arahan penataan permukiman dengan kegiatan usaha bernasib rumah tangga beripa kerjasama kelembagaan, pembinaan sumberdaya manusia, pengemban dan penumbuhan UBR, serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan lingkungan.
Nama Peneliti: Emil Salim Rasyidi Judul Skripsi: Perubahan Karakteristik Pola Ruang Permukiman Pesisir Suku Bajo Studi Kasus: Kelurahan Bajoe Kabupaten Bone	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan pola ruang permukaan pesisir suku Bajo dan faktor apa saja yang signifikan mempengaruhi perubahan tersebut.	Analisis deskriptif Spasial, analisis regresi linear	Menunjukkan bahwa perubahan pola ruang permukiman pesisir Suku Bajo pada lingkungan bajoe diawali dengan pembangunan jalan tahun 1980 sampai 1990 yang membatasi interaksi mereka terhadap laut.
Nama Peneliti: Nita Nova Judul Skripsi:	1. Mengidentifikasi karakteristik pergerakan penduduk terhadap	Analisis : Deskriptif dan Skatogram	1. Karakteristik pergerakan penduduk Suku bajo dominan bergerak menuju ke sarana pelayanan dasar pendidikan,



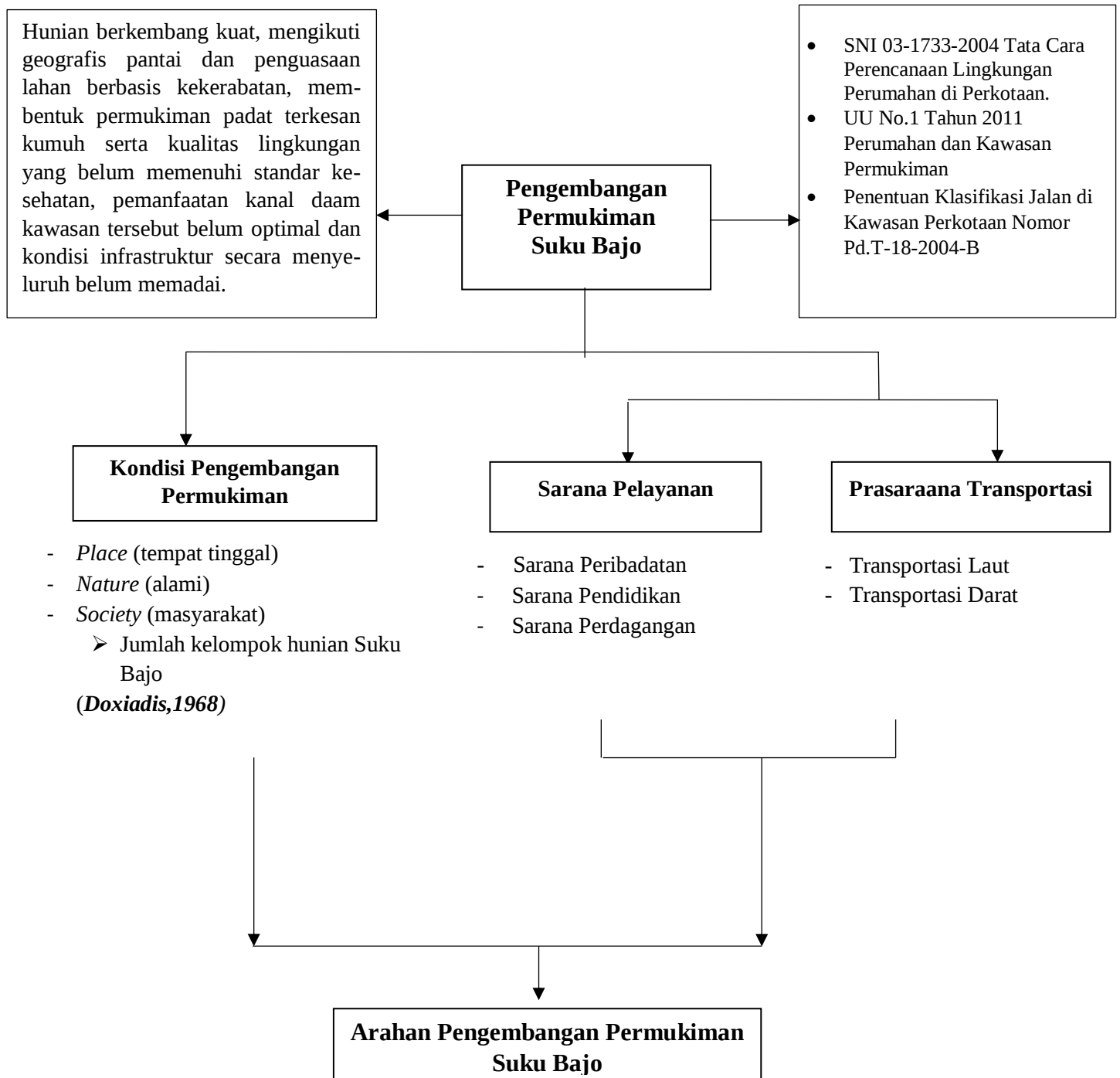
Pengembangan Pusat Pelayanan Permukiman Suku Bajo Di Kabupaten Konawe Sul-Teng	pemenuhan sarana pelayanan permukiman pesisir berdasarkan kearifan local masyarakat suku Bajo 2. Mengidentifikasi ketersediaan sarana permukiman suku bajo ditinjau dari hirarki pusat pelayanannya di Kecamatan Soropia 3. Menyusun konsep pengembangna pusat pelayanan permukiman di Kecamatan Soropiya dan dapat menunjang pola kehidupan Suku Bajo kabupaten Konawe	, analisis komparatif dan spasial	kesehatan , dan perdagangan dengan memilih sarana dengan jarak 500-1000 m, agar dapat dituju dengan berjalan kaki dari lokasi permukiman 2. ketersediaan sarana permukiman pada kawasan cenderung berpusat pada ibu kota Kecamatan yang hirraki pelayanannya memang berada pada skala kecamatan namun berdasarkan pergerakan penduduk lokasi yang paling banyak dikunjungi masyarakat berada pada pusat pelayanan <i>neighborhood</i>. 3. Konsep arahan pengembangan pusat pelayanan mempertimbangkan pola kehidupan dan kearifan Suku Bajo
--	--	-----------------------------------	--

Sumber : Penulis 2018

H. Kerangka Konsep Penelitian

Dalam studi ini beberapa konsep dan pemikiran pelaksanaan studi di paparkan dalam sebuah konsep terstruktur berupa kerangka pikir yang memuat keseluruhan kegiatan sampai terciptanya hasil yang diharapkan dari penelitian ini. Berikut kerangka konsep penelitian akan dijeleaskan dalam Gambar 2.5





Gambar 2.5
Kerangka Konsep